

No	Kasus	Lokasi/kejadian	Pelaku	Status hukum	Kerugian/besaran
1	Dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2002 senilai Rp 5,6 miliar	Kota Banda Aceh	Ketua DPRD Kota Banda Aceh M Amin Said, Wakil Ketua DPRD Muntasir Hamid (Partai Golkar) dan Anas Bidin Nyak Syech, Ketua Komisi B dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan T Saiful Hayat (PAN)	penyidikan	5600000000
2	Kasus bagi-bagi dana APBD lewat pembentukan Yayasan Bestari yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Pontianak. Gabungan kasus di Kalimantan Barat ini total kerugian sebesar Rp 4,7 miliar yang terbagi menjadi: kerugian negara di Kabupaten Pontianak Rp 2,8 miliar, sementara di Kabupaten Singkawang Rp 1,9 miliar. Untuk Kota Singkawang, dewan menganggarkan dana melalui asuransi, sementara Kabupaten Pontianak melalui Yayasan Bestari. Sementara untuk Kabupaten Pontianak, yang dipermasalahkan adalah bantuan untuk Yayasan Bestari, yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada anggota dewan sehingga merugikan negara. Tersangka H Makmur dan Andrean Felix didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Korupsi dan UU Yayasan. Selain berkas perkara, juga diserahkan sejumlah barang bukti, yakni sejumlah dokumen penting, kuitansi, dan nomor rekening yayasan	Kalimantan Barat	Ketua DPRD Kabupaten Pontianak Moses Alep dan dua wakil ketua DPRD, yaitu Effendi Cingkong serta Soetedjo, dua pengurus Yayasan Bestari H Makmur (bendahara) dan Andrean Ferix (wakil bendahara) ditetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan, sejumlah 85 anggota DPRD di Kalbar, yakni 40 anggota DPRD Kota Singkawang dan 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pontianak, bakal jadi tersangka.	Khusus untuk Kabupaten Pontianak, satu berkas dengan tersangka pengurus yayasan sudah dilimpahkan. Berkas kedua dengan tersangka unsur pimpinan dewan. Pengurus Yayasan Bestari hasil bentukan anggota DPRD Kabupaten Pontianak, yakni H Makmur (bendahara) dan Andrean Felix (wakil bendahara) sudah dilimpahkan ke pengadilan Mempawah. Berkas Ketua DPRD Kabupaten Pontianak Moses Alip dan dua wakil DPRD, masing-masing Effendi Cingkong dan Soetedjo, akan diserahkan pada tahap kedua.	4700000000

3	Dugaan korupsi bagi-bagi uang APBD 2001 senilai Rp 490 juta. Kasus penyelewengan itu terdiri atas kasus bancaan dana APBD 2002 senilai Rp 450 juta, penyimpangan dana Ikatan Keluarga Anggota Dewan (Igawan) Rp 180 juta, dan penyimpangan atau <i>mark up</i> realisasi dana APBD 2003	Jawa Tengah	Enam anggota DPRD Karanganyar dan diduga melibatkan mantan bupati Soedharmadji SH, Ketua DPRD Sumarso Dhiyono, dan Sekda Drs Kastono DS	Masih dalam tahap pengusutan Kejari Karanganyar	490000000
4	Dugaan korupsi APBD Kab. Cianjur senilai Rp 3 miliar dipergunakan untuk membiayai perjalanan ibadah haji 15 anggota DPRD Cianjur. Dalam persidangan yang membebaskan terdakwa, terungkap bahwa aturan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah PP Nomor 110 Tahun 2000, padahal aturan tersebut telah dibatalkan Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan begitu, PP Nomor 110 Tahun 2000 yang dipakai jaksa dianggap sudah tidak memiliki kekuatan hukum.	Jawa Barat	Deden Zaini Dahlan, Ketua DPRD Kab. Cianjur, Sekretaris DPRD Nani Anggraeni, dan Kepala Subkeuangan DPRD Tinoy Kustini Subli. Namun dalam persidangan tanggal 24 juni 2004 Pengadilan Negeri Cianjur memvonis bebas murni ketiganya.	diputus bebas	3100000000

5	<p>Kasus dugaan penggelapan dana anggaran Rp 9,572 miliar oleh DPRD Kota Bogor. Dana yang disebutkan dalam "Buku Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2003", sebagai biaya penunjang kegiatan DPRD ternyata tak ada perincian biayanya. Anggaran tersebut tercantum dalam subbab Anggaran Belanja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan (BAUP) DPRD yang merupakan Lampiran Keputusan Wali kota No. 71 tahun 2002, tertanggal 31 Desember 2002. Jumlahnya juga yang melanggar PP 110. Menurut PP 110, besar anggaran belanja dalam APBD adalah Rp 400 juta - Rp 3 miliar. Bila diambil jumlah maksimumnya saja yaitu Rp 3 miliar, maka dana yang diduga digelapkan mencapai Rp 6,5 miliar.</p>	Jawa Barat	Anggota DPRD dan walikota Bogor	penyidikan	9572000000
---	--	------------	---------------------------------	------------	------------

6	<p>Dugaan kasus penyalahgunaan anggaran keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2001-2002 senilai Rp 5,2 miliar. Dedi Sobandi, Dede Heru, Nasuha, dan Djajuli ditetapkan sebagai tersangka karena menurut hasil penyidikan, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan keuangan DPRD Ciamis. Selama penyidikan, kejaksaan telah meminta keterangan dari 53 saksi, termasuk mantan Bupati Ciamis periode 1999-2004, Oma Sasmita. Kejaksaan juga meminta pendapat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jabar serta seorang ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Dia menambahkan, tebal berkas perkara untuk masing-masing tersangka sekitar 333 lembar. Dari jumlah uang yang disalahgunakan sebesar Rp 5,2 miliar, sekitar Rp 4,689 miliar sisanya dikorupsi oleh anggota DPRD Ciamis lainnya. Untuk itu, setelah keempat tersangka yang ada saat ini disidangkan, anggota DPRD Ciamis lainnya juga akan diperiksa sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan, pengelolaan keuangan DPRD Ciamis ternyata tidak hanya melanggar Peraturan Pemerintah</p>	Jawa Barat	<p>Keempat tersangka adalah mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis yang sekarang menjadi Wakil Bupati Ciamis Dedi Sobandi, Wakil Ketua DPRD Ciamis Dede Heru, Wakil Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Ciamis Nasuha, dan Sekretaris DPRD Ciamis Djajuli. Ketika memulai penyidikan kasus ini pada awal bulan September 2003, Kejari Ciamis sebenarnya juga menetapkan Ketua DPRD Ciamis (saat itu) Hasan Mumu sebagai salah satu tersangka. Namun, penyidikan terhadap Hasan Mumu dihentikan karena yang bersangkutan meninggal pada pertengahan bulan September 2003.</p>	segera dilimpahkan ke pengadilan	520000000
---	---	------------	--	----------------------------------	-----------

7	Kasus dugaan KKN dan penyimpangan APBD Kab. Garut tahun 2003 serta adanya indikasi pelanggaran atas PP No. 110/ tahun 2000, khususnya masalah biaya penunjang kegiatan dan biaya perjalanan dinas pindah. Pada pertengahan Juni DPRD Garut mengembalikan dana ini. Ihwal pengembalian sebagian anggaran ini disampaikan oleh DPRD Garut dalam surat bernomor 900/148-DPRD tertanggal 14 Juni 2004 yang ditujukan untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Jumlah uang yang dikembalikan adalah Rp 2,5 miliar atau 37,88 persen dari nilai seluruh anggaran yang diduga dikorupsi, yang besarnya mencapai Rp 6,6 miliar.	Kabupaten Garut Jawa Barat	Pimpinan DPRD Kab. Garut ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri	Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut menyita beberapa dokumen yang akan dijadikan barang bukti dalam perkara kasus APBD-gate, dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Garut Ratiman, S.H., M.H., di gedung DPRD Kab. Garut	6600000000
8	Sejumlah anggota DPRD Jabar menerima dana siluman masing-masing sebesar Rp10 juta. Total keseluruhan dana yang diterima anggota Dewan Jumat (13/2), melalui bagian keuangan mencapai Rp1 miliar.	Jawa Barat	Anggota DPRD Jawa Barat termasuk ketuanya Drs. Eka Santosa	Kejati Jabar minta mendagri memberikan ijin pemeriksaan	33400000000
9	Dugaan korupsi dan penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2001. Dana anggaran yang disimpangkan itu adalah biaya tunjangan operasional DPRD Kota Cirebon tahun 2001 Rp 997 juta, padahal ketentuan dalam PP nomor 110, untuk Kota Cirebon biaya itu maksimal Rp 400 juta. Sementara yang Rp 400 juta itu juga belum jelas sesuai ketentuan atau tidak.	Jawa Barat	Masing-masing tersangka adalah Ketua DPRD H. Suryana, dua Wakil Ketua, H. Sunaryo, H.W., S.I.P., M.M dan Ir. H. Haries Sutamin. Kemudian, tujuh tersangka anggota panitia anggaran, yaitu Ir. Setiawan, Jarot Adi Sutarto, Agus Sompi, Suyatno H.A. Saman, Moch. Safari Wartoyo, Drs. Enang Iman Gana, dan H. Achmad Djunaedi	Kasusnya telah segera diimpahkan ke pengadilan	597000000

10	Kasus dugaan korupsi uang saku workshop/ lokakarya sosialisasi pemilu anggota DPRD Banyuwangi. Sebanyak Rp 225 juta dari total dana lokakarya Rp 400 juta yang dianggarkan dalam APBD 2004 itu, dibagi rata buat 45 anggota dewan. Dengan demikian, setiap wakil rakyat menerima uang saku sebesar Rp 5 juta	Banyuwangi Jawa Timur	Anggota DPRD Banyuwangi	penyidikan	225000000
11	Kasus penyimpangan dana jaminan hidup dan bekal hidup korban kerusuhan di bekas daerah konflik di Poso	Poso Sulawesi Tengah	lima anggota DPRD Poso	penyidikan	500000000
12	Dugaan kasus korupsi sebesar Rp 20 miliar, terkait dengan dana peningkatan sumber daya manusia (SDM) para anggota dewan tahun anggaran 2003/2004 Sidoarjo, dalam kasus penyimpangan anggaran peningkatan SDM DPRD senilai Rp 20,3 miliar.	Sidoarjo, Jawa Timur	45 orang anggota DPRD kabupaten Sidoarjo, telah diperiksa. Ketua DPRD Sidoarjo H Utsman Ihsan akhirnya ditahan Kejaksaan dan telah diadili	Dalam sebuah sidang eksepsinya ditolak	21900000000
13	Penyimpangan pengucuran APBD Jabar pada pos 2.14 untuk dana kaveling senilai Rp34,5 miliar yang ditemukan oleh kejati Jabar	Jawa Barat	Kurdi Moekri (Wakil Ketua DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) dan Suyaman (Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar).	penyidikan	34500000000

35	<p>Kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2001-2002 sebesar Rp10,4 miliar. Dalam sidang 8 Juni 2004 disebutkan bahwa Panitia Anggaran (Panggar) Kelompok B DPRD Padang secara bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD Padang periode 1999 hingga 2004, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperbesar jumlah penghasilan yang diterima. Akibatnya, keuangan negara dari pemerintah daerah dirugikan oleh para terdakwa sebesar Rp10.442.529.608,50. Para terdakwa juga telah menitipkan belanja DPRD pada Pos Sekretariat DPRD agar menambah penghasilan tetap mereka. Para terdakwa tidak saja menyimpang dari aturan dengan menumpangkan anggaran DPRD pada anggaran Sekwan. Mereka juga membuat perjalanan dinas fiktif yang mencatut dua maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia dan Mandala Airlines. Total tiket fiktif itu pun luar biasa besar, yaitu 807 buah tiket</p>	Kota Padang, Sumatera Barat	Ketua DPRD Kota Padang Maigus Nasir bersama dua wakilnya, Muhidi dan Chairul Indra, telah diadili di Pengadilan Negeri Padang sebagai terdakwa. Pada 8 Juni 2004 Zainul Arifin, Drs Masran Nasution, Ny Etti Saridin Mz, Amril Jilha BA, Drs Irdinansyah Tarmizi, Jonhar Junir, Irvan Tonius RB, Khairul Ikhwan, Syaukani Bsc, dan Syafriadi Autid menyusul disidang.	Dalam salah satu sidang eksepsi 10 orang anggota DPRD Kota Padang tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang, dengan alasan eksepsi telah masuk dalam pokok perkara yang disidangkan.	1040000000
----	--	-----------------------------	---	--	------------

14	Penyunatan dana bantuan imbal swadaya dari pusat sebanyak Rp 360 juta di Kupang. dimana setiap sekolah memperoleh Rp 60 juta. Namun ketika dicairkan, dana itu diduga kuat telah disunat oleh FT, oknum anggota DPRD Kota Kupang. Penyunatan itu dilakukan karena FT berdalih bahwa dialah yang melobi ke pusat sehingga dana itu turun	Kupang NTT	Ferdinand Terik, oknum anggota DPRD	sudah disidangkan	140000000
15	Penyimpangan uang negara sebesar Rp10,1 miliar yang diduga dimainkan oleh DPRD Manado dalam menetapkan APBD tahun 2003. Dana tersebut dialokasikan pada pos anggaran belanja lain-lain, tidak tercantum sebagaimana diatur Pasal 14 PP Nomor 110 Tahun 2000	Sulut	Tiga pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado telah diperiksa dengan dikeluarkannya Surat Izin Pemeriksaan (SIP) dari Gubernur Sulut Drs Adolf Sondakh.	penyidikan	10100000000
16	Dugaan korupsi dana mebelor sebesar Rp75 juta, yang mendudukkan Ketua DPRD Batola Husaini Ruslan sebagai Terdakwa	Batola-Kalsel	Ketua DPRD Batola Husaini Ruslan	penyidikan	750000000

17	Dugaan penyelewengan dana APBD Kabupaten Bogor senilai Rp1,2 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun masyarakat, disinyalir diselewengkan untuk meloloskan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bogor Agus Utara Effendi, yang masuk ke kantor para anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dana itu berasal dari pos 2.15.15 APBD tahun anggaran 2002 untuk biaya laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati.	Jawa Barat	Bupati Bogor Agus Utara Effendi dan 14 anggota DPRD Kabupaten Bogor	berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat	1200000000
----	---	------------	---	--	------------

54	Dugaan penyimpangan proyek dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Rp 6,9 miliar. Dana ini dialokasikan oleh Pemerintah Kota Solo untuk tiga proyek, yaitu rehabilitasi gedung balai kota, rehabilitasi Stadion Sriwedari, dan proyek pompanisasi pintu air, dan genset.	Surakarta Jawa Tengah	DPU dan pelaksana proyek ABT, yakni CV Agung Dharma Intra. Dalam perkembangan terakhir, 21 anggota DPRD Solo mengajukan hak penyelidikan, sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Tata Tertib DPRD Nomor 8/DPRD/X/1999 Pasal 12. Namun rapat paripurna pada Senin (28/6/04) di ruang paripurna DPRD menyepakati penghentian proses penggunaan hak penyelidikan yang telah diajukan 21 anggota tersebut. Keputusan penghentian itu ditetapkan setelah dilakukan voting terhadap 19 anggota DPRD yang hadir. Sebanyak 11 anggota menolak dilanjutkan, 7 sepakat dilanjutkan, dan seorang memilih abstain.	diperiksa oleh Polwil Surakarta	6900000000
----	---	-----------------------	--	---------------------------------	------------

18	Dugaan kasus penggelembungan anggaran pendapatan atau gaji cukup fantastis mencapai 100% menjelang berakhirnya tugas DPRD Jateng periode 1999-2004. Anggaran yang semula sebesar Rp 5,67 miliar meningkat menjadi Rp 10,59 miliar dalam perubahan APBD 2004. Adanya kenaikan anggaran sebesar Rp 4,91 miliar tersebut menurut pengamat sosial dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Amirudin merupakan perbuatan yang dapat digolongkan dalam korupsi konstitusional. Sebab Dewan telah membuat peraturan yang bukan untuk kepentingan rakyat, namun justru untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bisa dianggap telah merugikan rakyat dan negara.	Jawa Tengah	Anggota DPRD Jateng 1999-2004	masih dalam penyidikan	4910000000
----	---	-------------	-------------------------------	------------------------	------------

19	<p>Dugaan penyimpangan APBD 2003 hingga Rp 4 miliar lebih, dengan cara menyalahi PP No 110/2000. Anggaran yang dialokasikan pada pos DPRD itu berpijak berdasarkan pada PP No. 11 Tahun 2000. Itu sesuai dengan surat Gubernur Jateng pada Bupati Karanganyar nomor 180/8500, tanggal 16 Juni 2003. Padahal, PP tersebut tidak mengatur biaya penunjang, bantuan dan asuransi seperti yang dialokasikan dalam APBD 2003, yang mencapai sepuluh pos. Artinya hal itu bertentangan dengan PP Nomor 110 Tahun 2000. Penyimpangan itu digunakan untuk membiayai sepuluh pos anggaran bagi operasional anggota DPRD. Antara lain, untuk bantuan kegiatan fraksi, biaya penunjang pembahasan, asuransi kesehatan, bantuan rumah tangga pimpinan dan anggota, bantuan BBM pimpinan dan anggota, dan sebagainya.</p>	Karanganyar Jawa Tengah	Anggota DPRD Karanganyar	Kejaksaaan dinilai lamban, kemudian dilaporkan ke KPK oleh beberapa LSM yang ada disana	4000000000
----	--	-------------------------	--------------------------	---	------------

63	<p>Dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa yang dilakukan kolektif anggota DPRD Sumbawa. Temuan penyimpangan sebesar Rp 6,4 miliar selama tiga tahun itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Penyimpangan dana APBD Sumbawa terjadi pada 2001, 2002, dan 2003. Pembobolan terjadi di beberapa pos antara lain anggaran kesehatan Rp 3,240 miliar, tunjangan kegiatan Rp 2,255 miliar, anggaran pakaian dinas Rp 128 juta, anggaran purnabakti Rp 600 juta, dan anggaran Dewan Pertimbangan Daerah, dalam belanja Sekretariat Dewan DPRD Sumbawa, sebesar Rp 215 juta. Total kerugian negara Rp 6,438 miliar.</p>	NTB	Anggota DPRD Sumbawa		6438000000
20	<p>Dugaan korupsi dana otonomi daerah senilai 2,3 miliar di DPRD Sintang</p>	Kalimantan Barat	Anggota DPRD Sintang	penyidikan	2300000000

21	<p>Dugaan korupsi anggota DPRD Tulungagung yang merugikan negara sebesar Rp 1,6 miliar. Saat kasus dugaan korupsi dewan ini terjadi sewaktu Bustami menjadi Kajari, sudah memeriksa belasan anggota DPRD Tulungagung dan pejabat Pemkab Tulungagung. Dugaan korupsi mencuat setelah mantan Bupati Drs Budi Susetyo menolak kenaikan gaji pokoknya sebesar Rp 10 juta/bulan dari Rp 2,1 juta/bulan, sementara DPRD tetap ngotot memakai standar gaji bupati seperti yang tercantum dalam PP 110/2000.</p>	Jawa Timur	Anggota DPRD Tulungagung Jawa Timur	<p>masih dalam penyidikan. Belum ada kepastian resmi dari kejaksaan apakah kasus tersebut akan dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan atau justru akan di SP3-kan. Kajari belum sepenuhnya mengerti soal kasus dugaan korupsi anggota DPRD yang terjadi saat anggota DPRD menikmati kenaikan gaji fantastis pada bulan Januari-Juni 2003 lalu.</p>	1600000000
22	<p>Dugaan korupsi sebesar Rp46,6 miliar tahun anggaran 2001-2002 di Sekretariat DPRD (Setwan) Kutai Timur. Anggota DPRD Kutai Timur berdalih bahwa kasus dugaan korupsi sebesar Rp46,6 miliar tahun anggaran 2001-2002 di Sekretariat DPRD (Setwan) telah selesai. Karena telah dilaksanakannya pemeriksaan di Kejari Bontang yang tak menetapkan anggota dewan sebagai tersangka. Peraturan Pemerintah (PP) No 110/2000 yang menjadi dasar rujukan kejaksaan dinilai lemah. Karena PP tersebut menyebutkan, gubernur bisa saja membatalkan Perda yang dianggap menyalahi ketentuan. Selama ini Perda APBD Kutim tidak ada yang dibatalkan gubernur. Artinya Perda ini sudah sesuai dengan PP 110. Anggapan tersebut langsung dibantah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sangatta</p>	Kalimantan Timur	Darly Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur	penyidikan	46600000000

23	Kasus penyimpangan anggaran peningkatan SDM DPRD senilai Rp 20,3 miliar di Sidoarjo Jawa Timur. Dalam salah satu persidangan, beberapa anggota dewan telah menghitung ulang uang penerimaan mereka dengan angka yang dirinci jaksa. Setelah diteliti, ada selisih sampai Rp 100 juta lebih antara yang betul-betul diterima dan yang tertuang dalam dakwaan.	Jawa timur	Ketua DPRD Sidoarjo H Utsman Ihsan sudah ditahan, karena melanggar Pasal 2 dan 3 UU Korupsi.	Dalam sebuah sidang eksepsinya ditolak	2190000000
24	Korupsi yang diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Iwan Hendrawan atas dana partai (PDIP) sebesar Rp184 juta. Kapolda akan melakukan kerja sama dengan Polres Indramayu untuk mengusut kasus yang berawal dari masuknya laporan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP yang menyatakan bahwa Iwan Hendrawan, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Indramayu, diduga korupsi atas dana partai Rp184 juta. Dana itu seharusnya untuk kepentingan partai moncong putih. Hasil penyidikan Polda Jabar sejalan dengan hasil pemeriksaan tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketika diperiksa, Iwan Hendrawan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti autentik atas penggunaan uang yang dikeluarkannya selama menjabat Ketua DPC PDIP.	Jawa Barat	Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Iwan Hendrawan		184000000

25	Tindak pidana korupsi sebesar Rp 6,6 miliar tahun anggaran 2001-2003 di DPRD Kabupaten Garut	Garut Jawa Barat	Gubernur Jabar telah memberikan surat ijin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Rabu (26/5) yang memungkinkan dilakukannya pemanggilan terhadap 41 orang calon tersangka anggota DPRD Kab. Garut	dalam tahap penyidikan	6600000000
----	--	------------------	---	------------------------	------------

26	<p>Kasus korupsi APBD Kota Payakumbuh 2003. Modus bobolnya APBD Kota Payakumbuh 2003 ini terjadi dalam penyusunan anggaran dewan yang tidak mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Permendagri No 5 tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai korupsi di APBD Kota Payakumbuh Rp1 miliar. Dua pegawai sekretariat DPRD berperan besar dalam mencairkan APBD, dilihat dari sejumlah barang bukti berupa kuitansi yang mereka tanda tangani untuk keperluan ketua dan anggota Dewan. Dana tersebut dipergunakan antara lain untuk anggaran rapat Dewan, asuransi, kunjungan kerja, kesejahteraan, dan biaya telepon genggam anggota Dewan. Padahal, mata anggaran tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Di samping itu, anggaran yang mereka tentukan itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 5 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD. Ketua DPRD Kota Payakumbuh ini tidak saja melanggar PP</p>	Payakumbuh Sumatera Barat	<p>25 anggota DPRD Kota Payakumbuh, Sumatra Barat (Sumbar) dan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD Payakumbuh. Mereka itu Sekretaris Dewan (Sekwan) Mawardi dan Bendaharawan Dewan Zuraida telah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star (Sutan Tarmizi) (2-18 Juni 2004 ditahan di Mapolda), Azwar Arsyad dan Muhammad Nazir (Wakil Ketua). Menyusul Syafwan Datuk Nan Panjang, Syafwan Saleh, Bakri Ibrahim, Wardi Munir, Ramli Marzuki, Jendrial, Defrizal Adnan, Kartini, Syafnir Nafis, Djafilus, Akmal Syukri, Bulkhaini, Darlis, Syafruddin.</p>	<p>Pada bulan Juli 2004 Chin Star sudah sempat di ubah statusnya dari tahanan Polda jadi tahanan kota karena proses penyelidikan telah selesai</p>	100000000
27	<p>Dugaan penyimpangan dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2004 senilai Rp1,4 miliar yang digunakan untuk membayar pesangon anggota Dewan.</p>	NTT	<p>35 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).</p>	<p>Masih dalam pengusutan Polres Timor Tengah Selatan</p>	1400000000

28	<p>Kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun 2003 sebesar Rp 18,32 miliar. Beberapa LSM di Sulawesi Selatan melaporkan meliputi dugaan <i>mark up</i> anggaran tambahan penghasilan 75 anggota DPRD, tumpang tindih alokasi anggaran pokok DPRD dan Sekretariat Dewan (Sekwan), pengalihan sejumlah pos anggaran DPRD ke Sekwan, penerapan PP 110/2000 yang tidak sinkron dengan SK Gubernur Nomor 603 tahun 2003, dugaan masalah jumlah rapat dengan tunjangan rapat, tunjangan operasional dan pengawasan APBD, biaya operasional komisi, fraksi dan perjalanan daerah, <i>study</i> banding dewan ke luar negeri yang tak berpos anggaran. DPRD Sulsel sempat menggelar rapat tertutup yang materinya adalah untuk mengembalikan sisa anggaran tahun 2003</p>	Sulawesi Selatan	75 anggota DPRD Sulawesi Selatan		1832000000
----	---	------------------	----------------------------------	--	------------

29	<p>Kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Banda Aceh tahun anggaran 2002 senilai Rp5,7 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli 28 unit mobil pribadi anggota Dewan. Kasus korupsi pengadaan mobil pribadi anggota DPRD Kota Banda Aceh. Indikasi keterlibatan mantan petinggi kota Banda Aceh dalam kasus korupsi senilai Rp 5,7 milyar ini, karena ia turut menyetujui anggaran pembelian mobil pribadi anggota Dewan.</p>	NAD	<p>M Amin Said (ketua) dan dua orang wakilnya, yaitu Muntasir Hamid dan Razali Ahmad. Menyusul kemudian Wakil Ketua DPRD Banda Aceh yang lain Akhyar Abdullah telah ditahan untuk pemeriksaan. Mantan Walikota Banda Aceh, Drs Zulkarnain (tersangkut pula kasus dana PER dan telah ditahan di LP Keudah)</p>	<p>Sudah dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara pertama atas nama M Amin Said (Ketua DPRD Banda Aceh). Berkas kedua atas nama Amri M Ali (Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan/PPP) dan Dahlan Yusuf (dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP). Sedangkan berkas perkara ketiga atas nama tersangka Tgk Zubier Idris (Fraksi Partai Bulan Bintang/PBB), Fadhiel Amin (Partai Golkar) dan Tjut Ali Umar (Partai Amanat Nasional/PAN).</p>	5700000000
----	---	-----	---	--	------------

30	<p>Dugaan penyelewengan dana APBD Jateng sebesar Rp 36,229 miliar yang dilaporkan KP2KKN (Komite Penyelidik dan Pemberantasan KKN) Jateng. Secara hukum dugaan kasus korupsi itu tidak hanya melibatkan DPRD Jateng, tetapi juga Gubernur Jateng H Mardiyanto. Pasalnya, Perda tentang APBD ditandatangani oleh legislatif (Ketua Dewan) dan eksekutif (Gubernur). Jadi, dua-duanya kena. Namun, dalam hal ini ada sisi yang meringankan Gubernur, yakni dia tidak memanfaatkan anggaran yang dinilai bermasalah itu. Dana tersebut meliputi pos biaya perjalanan dinas, dana sarana khusus, biaya rumah tangga dewan, biaya pemilihan gubernur, biaya pengembangan SDM (sumber daya manusia), honor panitia DPRD, biaya observasi, serta dana penunjang kegiatan.</p>	Jawa Tengah	Ketua Panitia Rumah Tangga M. Asrofi, Sekretaris Panitia Rumah Tangga Wahono Ilyas, Sekretaris Dewan Didiek Samadikun, dan Kepala Bagian Keuangan pada Sekwan Bambang Harjono. Sementara empat ketua fraksi, Soeyatno (FPG), Hisyam Alie (FPP), Zuhar Maksum (FKB) dan Maulen Sinaga (Fraksi PDIP) pernah diminta keterangan oleh Kejati Jateng.	dalam tahap pemeriksaan	3622900000
----	---	-------------	--	-------------------------	------------

31	<p>Dugaan kasus pemotongan dana pembangunan 30 proyek. Total pemotongan dana proyek itu mencapai Rp 2 miliar. Hasil penyidikan kejaksaan menyimpulkan, dana tersebut kemudian disalurkan bupati untuk membayar pesangon bagi 40 anggota DPRD Konawe. Total pemotongan dana proyek itu mencapai Rp 2 miliar. Hasil penyidikan kejaksaan menyimpulkan, dana tersebut kemudian disalurkan bupati untuk membayar pesangon bagi 40 anggota DPRD Konawe. Kemudian sebanyak 37 anggota DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara termasuk Ketua DPRD Konawe Abdul Samad, sepakat mengembalikan dana pesangon yang sebelumnya telah mereka terima itu. Pengembalian dana pesangon yang besarnya Rp 50 juta untuk tiap-tiap anggota Dewan itu dilakukan karena pihaknya merasa tak berhak menerima uang tersebut. Apalagi, Mendagri Hari Sabarno sebelumnya telah mengeluarkan keputusan yang melarang pemberian uang purnabakti kepada anggota Dewan yang selesai masa tugasnya.</p>	Sulawesi Tenggara	40 anggota DPRD Konawe, yang mendapat dana pesangon, yang merupakan pengalihan pemotongan dana proyek oleh Bupati Konawe, Lukman Abunawas	Dalam pengusutan Kejaksaan dan 37 anggota DPRD kemudian mengembalikan dana tersebut.	2000000000
----	---	-------------------	---	--	------------

32	Kasus penyunatan dana imbal swadaya senilai Rp 140 juta di Dinas Pendidikan Kota Kupang. Ferdinan didakwa jaksa penuntut umum (JPU) dengan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini bermula dari proyek peningkatan fasilitas dan pemberdayaan SKTP tahun anggaran 2003 bagi 10 SLTP swasta di Kota Kupang. Terdakwa yang kebetulan duduk sebagai anggota Komisi C yang membidangi keuangan merasa memiliki andil yang cukup dalam proyek tersebut sehingga meminta imbalan dari enam SLTP masing-masing Rp20 juta untuk kegiatan monitoring dan Rp5 juta untuk kegiatan pelaporan sehingga total dana yang berhasil disunat sebanyak Rp140 juta	NTT	Ferdinad Therik, salah seorang anggota Komisi C DPRD Kota Kupang.	diancam hukuman 20 tahun	140000000
33	Dugaan korupsi APBD tahun 2001 hingga 2002 senilai Rp 5,3 miliar yang terjadi di DPRD Kabupaten Nganjuk.	Jawa Timur	Marmun, ketua DPRD Nganjuk	Sedang diusut oleh Polres Nganjuk berdasar SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) No B/34/II/2004 tertanggal 7 Juli 2004	5300000000

34	<p>Penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai lebih dari Rp 3,7 miliar di DPRD Bandar Lampung. Dalam rapat panitia khusus para terdakwa telah meningkatkan tunjangan asuransi kesehatan, yang semula diusulkan Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta per orang per tahun. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 disebutkan, tunjangan asuransi kesehatan semestinya dianggarkan sesuai dengan golongan IV sebesar Rp 40.000 per orang per bulan atau sebesar Rp 480.000 per tahun. Uang tunjangan asuransi itu kemudian disetorkan kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Lampung, dengan perjanjian jatuh tempo selama tiga tahun terhitung mulai 29 April 2002. Uang yang disetorkan sebanyak Rp 900 juta. Namun, pada 10 Juli 2002 uang jaminan asuransi itu ditarik kembali sebesar Rp 680 juta, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Bandar Lampung. Padahal, menurut ketentuan, uang itu tidak boleh dibagikan dalam bentuk tunai lantaran uang tersebut merupakan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi. Hal serupa dilakukan terhadap tunjangan kesejahteraan,</p>	Lampung	Palgunadi, Gusti Rahmat Katolo, dan Muchzan Zain, tiga anggota panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung telah diadili.		3700000000
----	---	---------	---	--	------------

35	Indikasi penyimpangan APBD 2003 di provinsi DIY sebesar Rp1,6 miliar. Penyimpangan tersebut terungkap setelah Perwakilan III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan. Menurut Gubernur DIY, penyimpangan itu dilakukan oleh kalangan DPRD DIY dengan cara belanja, tetapi tidak disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Indikasi ini terdapat dalam hal belanja DPRD DIY yang tidak menggambarkan realisasi sebenarnya dan tidak diyakini kebenarannya.	DIY	Anggota DPRD DIY		1600000000
36	Dugaan korupsi senilai Rp 1,9 miliar di DPRD Kota Singkawang Kalbar. Gubernur Kalbar, Usman Ja'far secara resmi mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap 25 anggota DPRD Kota Singkawang melalui surat Izin tertanggal Senin, 14 Juni 2004	Kalimantan Barat	25 anggota DPRD Kota Singkawang		1900000000

37	<p>Dugaan korupsi senilai Rp 5,2 miliar di DPRD Kota Mataram. Temuan dugaan korupsi itu berupa kesalahan pada sedikitnya tujuh pos, di antaranya penggelembungan dana belanja, pembukuan ganda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2001, 2002, dan 2003. Kasus ini dilaporkan oleh Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Advokasi Publik Nusa Tenggara Barat. Tujuh pos belanja yang diduga menyimpang adalah pos uang kehormatan, tunjangan kegiatan, biaya pemeliharaan kesehatan, tunjangan biaya listrik, air, telepon dan gas, tunjangan pembinaan fraksi, tunjangan produk Dewan, tunjangan pemeliharaan rumah Dewan, pendidikan dan peningkatan pengetahuan Dewan, dan tunjangan kesejahteraan untuk 2002. Pos-pos itu telah menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000. Pos biaya pemeliharaan kesehatan sebenarnya tidak diatur dalam PP Nomor 110 Tahun 2000, ternyata dimasukkan di bagian tunjangan kesejahteraan dalam bentuk asuransi kesehatan. Selain itu, uang kehormatan juga tidak diatur di PP Nomor 110 Tahun 2000, seperti tunjangan air, listrik, telepon, gas, dan tunjangan pem</p>	NTB	Anggota DPRD Kota Mataram		5200000000
----	---	-----	---------------------------	--	------------

38	<p>Kasus korupsi berkaitan dengan penyediaan tanah kuburan seluas enam hektar di Palembang, Sumatera Selatan. Yusuf Sumo diduga telah melakukan korupsi dana APBD 2003 sebesar Rp 415 juta. Total anggaran yang dialokasikan APBD sebenarnya Rp 600 juta, tetapi yang terpakai dan diduga dikorupsi sebesar Rp 415 juta. Pengadaan tanah kuburan itu dilakukan oleh Yusuf Sumo, Wakil Ketua Komisi A DPRD Palembang. Lokasinya di kawasan Gandus. Modus operandi yang dilakukan adalah memalsukan data pemilik tanah. Tanah seluas enam hektar yang disiapkan untuk lahan kuburan sebenarnya tanah tak bertuan dan diperkirakan tanah negara. Satu meter tanah rawa itu dihargai Rp 6.500.</p>	Sumatera Selatan	Yusuf Sumo, Wakil Ketua Komisi A DPRD Palembang		415000000
----	--	------------------	---	--	-----------

39	Kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sijunjung Sawahlunto Sumbar. Dari hasil penyidikan yang berkas perkaranya hampir rampung, semua anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung itu dari barang bukti dan pengakuan terdakwa telah menyalahi perundang-undangan yang berlaku, terutama PP 110 Tahun 2000, dalam menyusun APBD Sawahlunto Sijunjung Tahun 2003, yang menyebabkan kerugian negara Rp 1,2 miliar.	Sumatera Barat	Ketua Panitia Anggaran APBD Sawahlunto Sijunjung Tahun 2003 Syawal Jisad Gunung Bungsu, Wakil Ketua Panitia Anggaran Zulkarnain Mondo Datuak Bandaro Putih, Ketua DPRD Darwin Basyir, serta Wakil Ketua DPRD Hasanul Arifin Datuak Bandaro Rajo dan Rayendra Rasyid telah ditahan. Sementara seluruh anggota DPRD (35 orang) menjadi tersangka. 31 orang kasusnya ditangani kejaksaan negeri dan empat orang oleh mahkamah militer karena dari fraksi TNI/Polri.		1200000000
40	Dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandung senilai Rp 2,6 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2001 dan Rp 5,89 miliar pada TA 2002. Untuk TA 2002 terdapat komponen biaya observasi dan penyuluhan sebesar Rp 2,95 miliar dan biaya operasional Rp 2,94 miliar. Kedua komponen tersebut tidak diatur dalam PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD maupun Keputusan DPRD No 4 tahun 2000.	Jawa Barat	45 Anggota DPRD Kota Bandung [15 orang terpilih lagi]	Dalam penyidikan	5600000000

41	<p>Kasus dugaan <i>mark up</i> APBD Kotabaru tahun 2003 senilai Rp4,432 miliar di Kabupaten Kotabaru Banjarmasin. Sesuai laporan aliansi LSM Kotabaru, keempat petinggi parlemen itu dinilai telah melakukan <i>mark up</i> APBD tahun 2003 miliaran rupiah. Antara lain item yang di <i>mark up</i>, uang paket diplot sebesar Rp208,845 juta, padahal sesuai PP 110 tentang kedudukan keuangan DPRD seharusnya cuma Rp122,85 juta. Proses hukum kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Namun berkas berita acara pemeriksaan (BAP) hingga kini belum tuntas karena pihak Kejaksaan menilai masih banyak hal mendasar yang perlu dilengkapi (disempurnakan) penyidik Polres. Di antaranya belum adanya keterangan dari saksi ahli dan perhitungan keuangan dari BPKP. Dari sekian proyek dengan nilai tersebut di atas, terdakwa dinilai telah menyalahgunakan antara lain penyusunan master dan action plan yang tidak dilelang dan dan diberikan kepada orang/lembaga yang tidak berpengalaman, selain proyek ini sebelumnya tidak didahului dengan sebuah penelitian. Sebelumnya kasus Kater ini sangat meresahkan warga masyarakat Maluku Tenggara Barat (MTB) sempat te</p>	Kalimantan Selatan	empat petinggi DPRD Bumi Saijaan telah ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan lembaga legislatif yaitu H Iwan Machmud (ketua) beserta wakilnya yaitu Ir Sikun, Usman D Pahero, dan Syaerani Yusran		4432000000
----	--	--------------------	--	--	------------

42	<p>Kasus korupsi di lingkungan anggota Dewan di Kutai timur, Kalimantan Timur. Perkara korupsinya adalah menyangkut keuangan Sekretariat Dewan Kutai Timur tahun anggaran 2001-2002 sebesar Rp 46,6 miliar. Hal pembagian anggaran rutin itu tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2004 tertanggal 18 Mei 2004. Surat diteken Ketua Dewan Soekardi Jarwo Putro itu perihal bentuk tambahan biaya operasional DPRD Kalimantan Timur. Dana berasal dari pos anggaran penunjang operasional Rp 42, 3 miliar. Besaran dana yang dibagikan mencapai Rp 5,4 miliar, antara lain untuk medical check up dan biaya pendukung tugas lain. Setiap anggota Dewan mendapat bagian Rp 120 juta</p>	Kalimantan timur	<p>Ketua DPRD Kutai Timur Abdal Nanang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga anggota Dewan telah diperiksa pihak kejaksaan. Mereka adalah Bahrid Buseng, Alex Rohmanu, dan Sukarni Joyo. Sebelumnya, kejaksaan terus memeriksa Kepala Sekretariat Dewan Darly Yusuf yang juga sebagai tersangka</p>		4660000000
----	--	------------------	--	--	------------

43	Dugaan kasus korupsi di Diknas pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2003 senilai Rp 1,3 miliar di Muaraenim Sumsel. Kasus ini didesak untuk diungkap oleh beberapa LSM.	Sumatera Selatan	Anggota DPRD		130000000
44	Kasus dugaan korupsi anggaran belanja DPRD Sarolangun sekitar Rp 816 juta, berupa penggunaan dana rutin DPRD setempat menjadi insentif pimpinan dan para anggota dewan. Jumlah dana rutin yang diberikan sebagai insentif anggota selama tahun 2003 mencapai Rp 816 juta. Uang itu diterima anggota dewan per bulan. Anggota dewan yang diminta keterangan antara lain Drs Mardi Alfian, H Abd Rahman. Mantan Wakil Ketua DPRD Sarolangun, Kardini Amd juga sudah dipanggil penyidik Kejari Sarolangun karena dia yang menandatangani surat keputusan pemberian insentif dewan itu. Sementara dalam pekan ini, para anggota DPRD Sarolangun lainnya yang mendapatkan dana insentif tersebut juga akan diminta keterangan.	Jambi	25 orang anggota DPRD		816000000

45	<p>Korupsi dana APBD Tapin tahun 2000-2001 senilai Rp3,1 miliar. Dalam kasus korupsi Rp3,1 miliar tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Rantau selama Mei-September 2003 mengadili Sirajuddin selaku Ketua DPRD Tapin, dengan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan mengembalikan kerugian uang negara Rp711,5 juta. Sementara terhadap Effendi, selaku Sekretaris DPRD Tapin, dalam kasus yang sama di PN Rantau menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan mengembalikan kerugian uang negara Rp45 juta. Atas dasar putusan tersebut, kedua terdakwa yang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, Banjarmasin, kemudian mengajukan upaya hukum banding, namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel yang menguatkan putusan PN Rantau. Namun Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Ketua DPRD Tapin, Drs Sirajudin Noor yang akan dijadikan dasar proses hukum 22 anggota dewan lainnya. Dalam bulan Juni 2004 masyarakat menanyakan lagi status hukum tersangka.</p>	Kalimantan Selatan	24 anggota DPRD Tapin. Ketua dan anggota DPRD Tapin telah diadili dan kasasinya ditolak	telah diadili dan kasasinya ditolak	310000000
46	<p>Kasus penyelewengan dana operasional yang terjadi akhir Januari 2003 bersamaan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel. Sebelum APBD 2003 disahkan oleh DPRD, Adjis telah memerintahkan Abdul Shobur untuk mengajukan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) biaya operasional bagi pimpinan dan anggota dewan. SKO untuk dana sebesar Rp 7,5 miliar tersebut diajukan kepada Gubernur Sumsel saat itu, Rosihan Arsyad. Kasus ini masih dalam proses pengadilan.</p>	Sumatera Selatan	Abdul Shobur, Sekretaris DPRD Sumsel ketika terjadi kasus bagi-bagi uang dana operasional	dalam tahap penyidikan	750000000

47	kasus dugaan penyelewengan APBD tahun anggaran 2001 hingga 2003 untuk pemekaran wilayah sebesar Rp21 miliar lebih	Maluku Utara	Tujuh orang yang tergabung dalam tim pansus adalah Hamid Usman (Ketua Pansus Pemekaran), Fahri Lantu (Sekretaris Pansus), Syaiful Bahri Ruray (Ketua DPRD Halmahera Barat), Abdurahim Fabanyo (wakil ketua), Agil Bopeng (wakil ketua), Abdurahim Fabanyo (wakil ketua), dan Jusman Arifin (anggota)	sudah diperiksa oleh Polres Maluku Utara	2100000000
48	Kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002 senilai Rp193 juta Kabupaten Tanah Datar. Modus operandi wakil rakyat itu, dalam menyusun anggaran tidak mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Misalnya, tunjangan keluarga dan beras. Di antara anggota Dewan ada yang menerima ganda, sebab beberapa istri anggota Dewan ada juga yang pegawai negeri sipil (PNS)/ TNI dan Polri.	Sumatera Barat	seluruh anggota DPRD Batusangkar berjumlah 35 orang	ditetapkan sebagai tersangka	193000000

49	<p>Kasus penggelapan sisa uang tirtayatra (persembahyangan ke India) sekitar Rp 112 juta oleh 41 dari 45 anggota DPRD Buleleng. Cerita bermula ketika pimpinan dewan meminta sisa uang tirtayatra untuk dibagi- bagikan kepada pimpinan, staf, dan karyawan. Padahal seharusnya dikembalikan ke Pemkab Buleleng. Empat pimpinan dewan masing-masing mendapat Rp 19 juta. Sedangkan staf dan karyawan mendapat masing-masing Rp 50-100 ribu. Mereka ke India sekitar bulan Maret 2004</p>	Bali	41 dari 45 anggota DPRD Buleleng	ditetapkan sebagai tersangka	112000000
50	<p>Kasus dugaan korupsi dana purna bhakti 25 anggota DPD Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 1 miliar yang telah dihabiskan sebelum waktunya. Anggaran ini ternyata dipersoalkan kalangan pusat. Akibatnya, anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dibuat ketertarik, karena penganggaran dan pengeluaran dana itu menyalahi ketentuan yang ada. Aliansi Masyarakat Tebing Tinggi Anti Korupsi (AMTIK) melalui salah seorang aktivisnya, Azman MS Harahap, meminta anggota DPRD segera mengembalikan dana purna bhakti yang sudah mereka tilep itu</p>	Sumatera Utara	25 anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, diantaranya adalah H. Sakti Sinaga, Drs. Mhd.Hamzah Lubis(yang merupakan anggota dewan terpilih 2004-2009 dari PBB).	dalam status dugaan	100000000

51	<p>Kasus korupsi dana purnabakti DPRD Sragen senilai Rp 2,25 miliar. Dana purnabakti tersebut nilainya Rp 2,25 miliar, masing-masing anggota Dewan mendapat Rp 50 juta. Karena dianggarkan pada APBD 2003, maka dari itu sudah dicairkan. Untuk sementara, dana disimpan di rekening masing-masing anggota yang khusus dibuatkan oleh Sekretariat Dewan. Rekening tersebut, belum dibagikan kepada anggota Dewan. Meski demikian, sudah banyak anggota Dewan meminjam uang ke Sekretariat Dewan dengan jaminan dana purnabakti tersebut.</p>	Jawa Tengah	Anggota DPRD Sragen dan bupati Sragen Untung Wiyono	Masih dalam penyelidikan Kejari Sragen	2250000000
53	<p>dugaan penyimpangan dana APBD tahun 2002 dan 2003 di DPRD Dumeneop. Disebutkan, gaji anggota dewan tahun 2002 rata-rata sekitar Rp 8 juta. Padahal, seharusnya anggota dewan menerima sebesar Rp 3 juta. Bertambahnya jumlah tersebut, menurut LSM, adanya tambahan tunjangan baru yang jumlahnya menjadi 17 macam pos tunjangan. Misalnya, tunjangan uang kunjungan, perjalanan dinas tetap, perjalanan dinas rutin, biaya operasional, sewa gedung, perjalanan dinas kepulauan, dan uang rapat. Selain itu, anggota dewan mendapatkan THR sebesar Rp 5 juta dan juga uang SDM sebesar Rp 10 juta. Sedangkan untuk penyimpangan APBD 2003, LSM melaporkan ke Kajati terkait jumlah pos anggaran bagi anggota dewan yang bertambah menjadi 12 pos anggaran. Yakni pada pos anggaran makan dan minum, biaya pembahasan perda, biaya pembahasan APBD, dan biaya perjalanan dinas luar. Selain itu, anggota dewan juga mendapatkan THR sebesar Rp 6 juta, namun hal ini tidak dilaporkan dalam APBD 2003. Mereka juga melaporkan adanya uang pesangon</p>	Jawa Timur	Anggota DPRD Sumenep	Dilaporkan oleh LSM ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur. Namun karena dinilai 'sebrono', akhirnya anggota DPRD mengancam akan melakukan tuntutan secara hukum karena dinilai mencemarkan lembaga DPRD Sumenep.	

54	<p>dugaan korupsi Rp 18,12 miliar di DPRD Sulawesi Selatan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diduga terjadi penggelembungan anggaran di pos anggaran DPRD Sulsel dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003. Bastian Lubis, pengamat keuangan dan Direktur STIE Patria Artha melihat terjadi penggelembungan anggaran dan penempatan pada sejumlah pos yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD. Kejanggalaan itu antara lain adalah anggaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp 11,4 miliar. Dalam PP Nomor 110/2000 hanya dikenal enam jenis penghasilan yakni uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, komisi, khusus, dan tunjangan perbaikan penghasilan dan tidak ada tunjangan tambahan penghasilan. Selain itu, ada pos anggaran yang seharusnya masuk ke sekretariat dewan, ternyata dimasukkan menjadi pos anggaran DPRD. Total dugaan penyimpangan sebesar Rp 18,12 miliar.</p>	Sulawesi Selatan	13 orang anggota DPRD Sulawesi Selatan	diusut oleh Polda Sulsel	1812000000
----	--	------------------	--	--------------------------	------------

55	kasus pembengkakan dana operasional Dewan untuk tahun anggaran 2004 sebesar Rp2.16 miliar, di DPRD Kota Semarang.	Jawa Tengah	45 anggota DPRD Kota Semarang. Sementara Ketua Komisi C Fatur Rahman diperiksa oleh Kepala Seksi Tindak Perdata Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang Gatot Gunarto, sedangkan dan Sekretaris Komisi C Agustina P Wilujeng diperiksa oleh Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubagbin) Sadiman	diperiksa oleh Kejari Semarang	2160000000
56	kasus dugaan korupsi keuangan dewan senilai Rp 2,1 miliar di DPRD Kota Malang.	Jawa Timur	Tim panitia anggaran DPRD Kota Malang. Ketua tim panggar DPRD Dra Sri Rahayu, Wawali Kota Malang Drs Bambang Priyo Utomo yang juga mantan anggota panggar, serta H Bambang Satria SH MH telah dimintai keterangan.	dalam pengusutan Kejari Malang	2100000000

57	Kasus dana perumahan anggota DPRD Banten senilai Rp 10,5 miliar atau Rp 130 juta per orang	Banten	75 anggota Dewan Banten yang menerima dana tersebut, beberapa anggota, yaitu Yayat Suhartono, Ahmad Firdaus, dan Mudjahid Chudari dari Fraksi Amanat Bintang Keadilan, mengembalikan uang itu. Dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan berjanji akan mengembalikan uang kompensasi rumah dinas untuk 22 anggotanya atau senilai Rp 2,86 miliar, paling lambat 31 Desember 2003. Tetapi, hingga Juli 2004, janji itu tidak pernah dipenuhi.	Kejaksaan tinggi Banten, berjanji akan mengusut kasus tersebut	1050000000
58	Korupsi dana rutin sekretariat DPRD tahun anggaran 2003-2004 dan kasus pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPJ) fiktif	Sulawesi Tenggara	22 anggota DPRD Kota Kendari	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan statusnya dalam tahanan kota	580000000
59	kasus korupsi dana rutin DPRD sebesar Rp9,4 miliar	Jawa Barat	7 anggota DPRD Depok Jawa Barat	Dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya	9400000000
60	kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,36 miliar yang dilakukan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang periode 1999-2004 pada tahun 2003.	Banten	anggota DPRD Kota Tangerang	dugaan korupsi ini pertama kali muncul pada 6 Juli 2004 dan kini masih dalam pengusutan Kejaksaan Negeri Tangerang	1360000000
61	kasus korupsi dana APBD Banggai tahun 2003 senilai Rp 2,2 miliar lebih	Sulawesi Tengah	8 anggota DPRD Banggai	Menunggu surat ijin pemeriksaan dari Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).	2200000000
62	dugaan korupsi dana APBD Kampar sebanyak Rp1,125 miliar	Riau	45 Anggota DPRD Kampar	Kejati Riau memastikan statusnya sebagai tersangka	1125000000

Jumlah	475283000000.00
---------------	------------------------

(empat ratus tujuh
puluh lima milyar dua
ratus tiga puluh juta
rupiah)